

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN DILIHAT DARI PENDAPATAN DAERAH PADA
APBD 2010-2012**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

DIDIN KRISTANTO

B 200 090 290

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**"ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KLATEN DILIHAT DARI PENDAPATAN DAERAH PADA APBD 2010-2012"**

Yang ditulis oleh:

DIDIN KRISTANTO
B 200 090 290

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat
untuk diterima.

Surakarta, 12 Maret 2014

Pembimbing



(Dra. Nursiam, Ak. M.H)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.Si)

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Dilihat Dari Pendapatan Daerah Pada APBD 2010-2012”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD tahun anggaran 2010-2012.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Klaten, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2010-2012. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan rasio kemandirian keuangan selama tiga tahun masih diantara 0-25% tergolong dalam pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. (2) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten cukup efektif. Hasil rasio efektifitas pada tahun 2010 sebesar 88,89%, sedangkan tahun 2011 dan 2012 sebesar 100,99% dan 109,81%. (3) Hasil Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 sampai 2012 sudah menunjukkan efisien dalam mencapai penerimaan PAD, karena rasio yang dicapai kurang dari 100%. Secara keseluruhan tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah efisien. (4) Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan disetiap tahunnya.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten*

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang diwujudkan dengan

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber utama untuk melaksanakan otonomi daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah (Halim:2007).

Tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi adalah Kabupaten Klaten. Obyek pariwisata di Klaten dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam dan budaya atau sejarah. Dengan adanya tempat-tempat wisata tersebut, maka potensi pendapatan daerah akan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah, yang disebabkan dari besarnya sumber daya yang dimiliki kota Klaten dari sektor-sektor yang lain.

Salah satu sumber utama PAD pada era otonomi daerah di Kabupaten Klaten adalah pada sektor pariwisata, mengingat pada sektor inilah yang paling potensial yang menghasilkan pendapatan yang sangat besar karena sifatnya yang multisektoral dan *multieffects*. Dengan sektor kepariwisataan akan mendukung peningkatan pendapatan dari berbagai sisi mulai retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel dan restoran, perijinan usaha pariwisata. Pengembangan tersebut tentunya harus dikelola melalui peningkatan nilai tambah sumber daya yang dikelola secara terpadu dengan memperhatikan aspek pemerintahan yang baik, desentralisasi, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam membiayai rumah tangga sendiri, dalam arti sampai sejauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan

keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Dengan perubahan yang mendasar tersebut, maka dampak yang akan dirasakan oleh pemerintah daerah bukan hanya menyangkut perubahan sistem dan struktur pemerintahan daerah, melainkan dan terutama menyangkut kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia aparatur baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan memiliki akuntabilitas. Sumber daya manusia yang diperlukan bukan hanya memiliki keterampilan dan kemampuan profesional dibidangnya, tetapi juga memiliki etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi serta pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Klaten yaitu: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat ke daerah melalui proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD dengan total penerimaan daerah dibanding besarnya subsidi yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak-pajak daerah, restribusi daerah, laba bersih dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan uraian diatas judul penelitian ini adalah “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN DILIHAT DARI PENDAPATAN DAERAH PADA APBD 2010-2012”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupataen Klaten dilihat dari pendapatan daerah pada APBD 2010-2012?

C. Pembatasan Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem kinerja pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, serta keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia, penulis membatasi permasalahan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terhadap laporan keuangannya saja pada tahun anggaran 2010-2012.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dari tahun anggaran 2010-2012.

E. Manfaat Penelitian

1. Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, pembandingan dan bahan acuan bagi instansi pemerintah dalam rangka upaya peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

F. Tinjauan Pustaka

Macam-Macam Rasio Keuangan Pada APBD

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Secara konseptual pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.

Paul Harsey dan Kenneth Blancard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Halim, 2002:168-169) antara lain:

- 1) Pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan *konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola hubungan *partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 1

Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	<i>Instruktif</i>
Rendah	25% - 50%	<i>Konsultatif</i>
Sedang	50% - 75%	<i>Partisipatif</i>
Tinggi	75% - 100%	<i>Delegatif</i>

Sumber : Abdul Halim (2002)

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber pendapatan dari pihak ekstern}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2008:234) Rasio efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapaimencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

c. Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2008:235) Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2008:241) Rasio pertumbuhan (*Growth Ration*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } x_{n-1}}$$

Keterangan : x_n = Tahun yang dihitung
 x_{n-1} = Tahun sebelumnya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, membandingkan, menganalisis, dan interpretasi data yang akhir pada kesimpulan yang didasarkan pada penelitian data. Hasilnya ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti (kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten) jika ditinjau melalui analisis rasio keuangan APBD.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data tersebut merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012.

b. Sumber data

Data diperoleh dari sumber instansi yang terkait yaitu : Kantor DPPKAD Kabupaten Klaten

Adapun data yang diambil yaitu :

- a) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012
- b) Gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Klaten.

H. Analisis Data dan Pembahasan

Berikut merupakan pertumbuhan dan kontribusi realisasi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah terhadap total penerimaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2010-2012.

Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah terhadap Total Penerimaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010-2012.

Secara garis besar menggambarkan pertumbuhan dan kontribusi realisasi sumber-sumber penerimaan keuangan daerah terhadap total penerimaan keuangan daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk sumber penerimaan keuangan dari pendapatan asli daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2010 Rp54.886.005.749, di tahun anggaran 2011 Rp72.290.993.848 dan tahun anggaran 2012 Rp84.755.834.704 yaitu tahun anggaran 2010 sampai 2011 naik sebesar Rp17.404.988.099 dan tahun anggaran 2011 sampai 2012 sebesar Rp12.464.840.856.

1. Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil terlihat bahwa PAD dan sumber pendapatan dari pihak ekstern pada tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012 mengalami kenaikan. Rasio kemandirian Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 sebesar 5,46%, di tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan menjadi 5,60% atau mengalami kenaikan 0,14%, dan pada tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan menjadi 5,94% atau mengalami kenaikan 0,34%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa rasio kemandirian selama tiga tahun pada Kabupaten Klaten memiliki tingkat kemandirian masih rendah dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peran pemerintah pusat sangat dominan daripada daerah. Ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara 0-25%. Rasio kemandirian yang rendah sekali mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan pusat.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Perhitungan rasio efektifitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dari tabel diatas, pada tahun anggaran 2010 menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Klaten dalam mencapai penerimaan PAD belum sesuai target dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, sedangkan pada tahun anggaran 2011 dan 2012 dilaksanakan sesuai target karena rasio yang dicapai lebih dari 1 (satu) atau 100%.

Besarnya rasio efektifitas untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 sebesar 88,89%, ini membuktikan bahwa penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD dapat dikatakan belum efektif. Pada tahun anggaran 2011 rasio efektifitas sebesar 100,99%, ini membuktikan bahwa penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD dapat dikatakan efektif. Analisis rasio efektifitas pada tahun anggaran 2012 sebesar 109,81% , ini membuktikan bahwa penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD dapat dikatakan efektif. Secara keseluruhan tingkat efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah efektif tetapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Rasio Efisiensi

Perhitungan rasio efisiensi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dari tabel diatas, pada tahun anggaran 2010 sampai 2012 menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Klaten dalam mencapai penerimaan PAD mengalami efisiensi berdasarkan potensi riil daerah, karena rasio yang dicapai kurang dari 100%. Besarnya rasio efisiensi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 sebesar 1,97%, ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah efisien. Pada tahun anggaran 2011 rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 1,40%, ini dapat dikatakan dalam pemungutan PAD sudah efisien. Analisis rasio efisiensi pada tahun anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar 2,63%, ini dapat dikatakan biaya pemungutan PAD sudah efisien. Secara keseluruhan tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah efisien tetapi mengalami penurunan pada tahun 2012.

4. Rasio Pertumbuhan

Dari perhitungan dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2010 tidak dapat dihitung, karena tahun tersebut sebagai tahun dasar periode. Pertumbuhan PAD pada tahun anggaran 2011 sebesar 31,71%. Kemudian tahun anggaran 2012 PAD mengalami penurunan menjadi sebesar 17,24%. Begitu juga rasio pertumbuhan pendapatan

pada tahun anggaran 2011 sebesar 28,67%. Selanjutnya pada tahun anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar 10,81% . Rasio pertumbuhan di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten secara keseluruhan mengalami penurunan disetiap tahunnya.

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Klaten selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah selama tiga tahun masih diantara 0-25% tergolong dalam pola hubungan instruktif berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi. Disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.
2. Hasil perhitungan rasio efektifitas Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 sebesar 88,89 % menunjukkan belum efektif. Dan tahun anggaran 2011 sampai 2012 masing-masing sebesar 100,99% dan 109,81% menunjukkan efektif. Secara keseluruhan rasio efektifitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah efektif tetapi mengalami kenaikan disetiap tahunnya.
3. Rasio efisiensi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 sampai 2012 menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Klaten dalam mencapai penerimaan PAD mengalami efisiensi berdasarkan potensi riil daerah, karena rasio yang dicapai kurang dari 100%. Besarnya rasio efisiensi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 mencapai 1,97%, pada tahun anggaran 2011 rasio efisiensi mengalami kenaikan menjadi 1,40%. Analisis rasio efisiensi pada tahun anggaran 2012 mengalami penurunan efisiensi menjadi 2,63%. Secara keseluruhan tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah efisien tetapi mengalami penurunan pada tahun 2012.
4. Berdasarkan rasio pertumbuhan Kabupaten Klaten rata-rata keseluruhan mengalami penurunan disetiap tahunnya.

J. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data serta kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu data sekunder dari Pemerintah Kabupaten Klaten hanya selama tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2012 saja.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat model analisis rasio keuangan, sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh

K. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang akan datang sebaiknya memperpanjang periode penelitiannya lebih dari tiga tahun terakhir sehingga diperoleh hasil analisis yang lebih lengkap dan menyeluruh.
2. Penelitian berikutnya diharapkan melengkapi alat analisis yang digunakan, tidak hanya menggunakan empat alat analisis saja. Sehingga alat analisis yang digunakan lebih lengkap dan mendapatkan hasil analisis yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, C.R. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ananda, Chitra dan Widyatmini. (2012). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan.
- Enceng, Liestyodono B. Irianto, dan Purwaningdyah MW. 2012. Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 12. No. 1. Juli 2012 : 1-73
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- _____. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2008. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Mustofa, Bob dan Halim, Abdul. 2009. Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 7. No. 4. November 2009.
- Nataluddin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah di Propinsi Jambi. Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN.
- Noerdiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, Andi. (2011). Analisis Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah Pada APBD 2006-2008. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sidharta, E.A. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemda dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan pada APBD di Kota Malang. Forum Penelitian. Vol. 20. No. 2. Desember 2008.
- Sularso, Havid dan Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah .Media Riset Akuntansi. Vol. 1. No. 2. Agustus 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pemerintah Daerah serta Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. 2008. Undang-Undang Republika Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.